

PORTOFOLIO

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

(Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Kelompok dengan Menganalisis 3 Artikel dari Media Massa Online, 3 Jurnal Nasional, 2 Jurnal Internasional, serta 1 Laporan Keuangan Sektor Publik)

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.
3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh Kelompok 9:

1. Rizka Mufidah 2313031001
2. Sela Ayu Irawati 2313031015

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI JURUSAN
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

Analisis Artikel 1

A. Identitas Artikel	
1. Judul artikel	: Laporan Keuangan Sektor Publik
2. Penulis	: Harmony
3. Tahun Terbit	:2021
4. Tujuan	: Kenali Fungsi Dan Bedanya Dengan Sektor Swasta
B. Isi Artikel	
<p>Laporan keuangan sektor publik dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat serta terbuka untuk publik , Karena tujuan pembuatan laporan keuangan sektor publik ini supaya berguna bagi sejumlah pemakai laporan keuangan segmen, sehingga bisa mengevaluasi keputusan dari mana alokasi sumber daya yang dibutuhkan dan apa saja kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.</p> <p>Oleh karena itu sektor publik perlu membuat kebutuhan informasi laporan keuangan yang harus direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen pengendalian.Begitu juga dengan pemegang saham di sektor publik, yang membutuhkan informasi laporan keuangan sektor publik secara relevan, handal, dan bervariasi untuk mengambil suatu keputusan.</p>	
Kesimpulan	
<p>Melalui fungsi laporan keuangan ini memberikan kesempatan bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan publik, maupun dengan pihak lain yang berkepentingan atas pencapaian yang telah mereka buat, Dalam persamaan laporan keuangan sektor publik dengan swasta bisa dilihat dari beberapa sumber dokumen yang digunakan, serta memiliki peran yang berhubungan dengan masyarakat.</p>	
Referensi/Sumber	
<p><u>Laporan Keuangan Sektor Publik: Kenali Fungsi Dan Bedanya (harmony.co.id)</u></p>	

Analisis Artikel 2

A. Identitas Artikel	
1. Judul artikel:	6 Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik dalam Organisasi
2. Penulis:	Kasih Purwantini
3. Tahun Terbit	:2021
4. Tujuan:	Mengenal peran akuntansi sector public dalam organisasi
B. Isi Artikel	

Tulisan ini menjelaskan akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, pengkomunikasian informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen perencanaan untuk pengambilan keputusan. Manajemen sektor publik akan memberikan informasi akuntansi yang dapat dipakai oleh manajer sektor publik untuk melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian suatu entitas, lembaga, atau perusahaan. Akuntansi sektor publik dapat memberikan informasi yang kredibel, relevan, handal, dan dapat dipercaya. Peran akuntansi manajemen dalam sektor publik merupakan hal yang penting. Adapun 6 peran akuntansi manajemen sektor public dalam organisasi, yaitu:

1. Perencanaan Strategis, manajer membuat perencanaan dan alternatif-alternatif program untuk mendukung strategi organisasi agar berjalan dengan efektif. Akuntansi manajemen memberikan peran dalam menyediakan data dan informasi, seperti *cost of activity* dan *cost program*. Perencanaan dimulai dari perencanaan strategis sampai pengendalian berupa *task control*.
2. Memberikan Informasi Biaya, biaya yang dimaksud adalah biaya input, biaya proses, dan biaya output. Informasi biaya tersebut wajib diberikan karena berhubungan dengan transparansi dana, sehingga manajemen dapat mengevaluasi biaya apakah berlebih dan kurang.
3. Penilaian Investasi, untuk melakukan penilaian, teknik yang digunakan dalam sektor publik dan sektor swasta berbeda. Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
4. Penganggaran (*Budgeting*), akuntansi manajemen sektor publik memberikan fasilitas untuk menciptakan anggaran yang efektif dan efisien. Peran akuntansi manajemen adalah menjadi alat untuk melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber dana publik kepada masyarakat secara tepat, adil, dan efisien.
5. Penentuan Biaya dan Tarif Pelayanan, akuntansi manajemen dapat digunakan untuk menghitung pengeluaran yang digunakan untuk memberikan layanan, termasuk juga pengeluaran subsidi yang diberikan untuk kepentingan publik.
6. Penilaian Kinerja, akuntansi manajemen juga dapat digunakan untuk menilai kinerja, seperti mengukur seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan.

Kesimpulan

Manajemen sektor publik akan memberikan informasi akuntansi yang dapat dipakai oleh manajer sektor publik untuk melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian suatu entitas, lembaga, atau perusahaan. Adapun 6 peran akuntansi manajemen sektor publik dalam organisasi, yaitu (1) perencanaan strategis, manajer membuat perencanaan dan alternatif-alternatif program untuk mendukung strategi organisasi agar berjalan dengan

efektif, (2) memberikan informasi biaya, wajib diberikan karena berhubungan dengan transparansi dana, (3) penilaian investasi, sektor public mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, (4) penganggaran (*budgeting*), tiga fungsi anggaran, yaitu stabilitas, distribusi, dan alokasi sumber daya public, (5) penentuan biaya dan tarif pelayanan, menghitung pengeluaran yang digunakan untuk memberikan layanan, (6) penilaian kinerja, dapat digunakan sebagai system pengendalian suatu organisasi.

Referensi/Sumber

Purwantini, Kasih. 2021. *6 Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik dalam Organisasi*. Universitas Stekom. Diakses melalui <http://komputerisasi-akuntansi-d3.stekom.ac.id/informasi/baca/6-PERAN-AKUNTANSI-MANAJEMEN-SEKTOR-PUBLIK-DALAM-ORGANISASI/741002b545bb31295fd1ae1d9bcd60276e9e> pada 22 November 2022.

Analisis Artikel 3

A. Identitas Artikel

1. Judul artikel: Laporan Keuangan Sektor Publik
2. Penulis: Komunitas Pengusaha Muslim
3. Tahun Terbit: 2020
4. Tujuan : Untuk mengetahui apa itu laporan keuangan sektor Publik

B. Isi Artikel

Dengan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menjadi implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan, namun laporan keuangan bukan merupakan tujuan akhir dari akuntabilitas publik, Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik.

Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut, adapun tujuan umum dari pelaksanaan laporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

Kesimpulan

Laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan atau financial, informasi mengenai bagaimana entitas mandanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, informasi mengenai kondisi financial suatu entitas dan perubahan didalamnya, dan juga informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal bidang jasa, efisiensi.

Referensi/Sumber

Sumber Referensi : [*Apa Itu Laporan Keuangan Sektor Publik ? – PengusahaMuslim.com*](#)

Analisis Jurnal Nasional 1

A. Identitas Jurnal

1. Judul : Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Sistem Keuangan Pemerintahan Desa
2. Jenis Jurnal : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unila
3. Nama Penulis : Erika Rahma Setiyani dan Risky Nurfadila
4. Tahun Terbit :2021
5. Tanggal Diakses: 25 November

B. Pembahasan

1.Abstrak

Penggunaan APBD atau dana desa sekarang ini dituntut untuk mempunyai akuntabilitas keuangan yang efisien. Penelitian ini mempelajari tentang kebijakan akuntansi, proses penganggaran, dan besaran transaksi keuangan pemerintah desa yang lebih kecil dibandingkan dengan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah desa Gendingan sudah mematuhi dan dijalankan sesuai dengan peraturan berlaku, kemudian dinilai akuntanbel dalam penyajian laporan pertanggungjawabanya.

2.Pendahuluan

Penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa diatur pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Menteri Dalam Negeri, No.113 Tahun 2014). Pemerintahan desa memiliki peranan penting dan strategis karena menjadi unit terkecil pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Jika pemerintahan desa mengalami kemajuan, maka sistem pemerintahan daerah, provinsi dan negara pun akan maju. Karena desa merupakan sumber atau basis kemajuan suatu negara. Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian yang relevan sebelumnya.

3.Kajian Teori

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, yang disebut Desa merupakan suatu badan hukum yang bertempat tinggal dan mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Menurut (Mujiatyyulia, 2019) Ekonomi fundamental umumnya berfokus pada ruang lingkup ekonomi akuntansi pada sektor publik. Sedangkan Akuntansi sendiri adalah bidang ilmu yang mempengaruhi tingkat perkembangan perusahaan atau pemerintah dan menetapkan kondisi dimana keuntungan akan didapat. Proses pengendalian manajemen sektor publik dapat dijalankan melalui saluran komunikasi formal dan informal. Kegiatan formal dalam organisasi antara lain: perumusan strategi, planning, budgeting, belanja, dan evaluasi kinerja

4.Meode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan memakai metode kualitatif.

5.Hasil dan Pembahasan

Laporan keuangan tersusun menggunakan metode basis akrual. Kebijakan ini berperan penting bagi entitas akuntansi dan pelapor dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Pemerintah daerah adalah entitas pelapor, sedangkan adalah SKPD dan PPKD adalah entitas akuntansi. Di desa Gendingan, transaksi telah dijurnal, dan bendahara telah menggunakan sistem pembukuan yang disebut Siskeudes.

Kesimpulan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan desa Gendingan sudah mematuhi aturan sesuai peraturan yang ada. Kemudian, penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis desa (Siskeudes) membuktikan bahwa pemerintah desa Gendingan selama ini bekerja keras dalam menyusun laporan pertanggungjawabannya. Kekompakan dan budaya masyarakat Desa Gendingan mendukung jalannya pemerintahan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Referensi/Sumber

Setiyani Erika R, dan Risky Nurfadila. 2021. Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Pemerintahan Desa. Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita. Vol 1. No.2

Analisis Jurnal Nasional 2

A. Identitas Jurnal

1. Judul : *Journal of Public Sector Innovations* (JPSI)
2. Volume, Nomor: Vol.05, No. 2
3. Jenis Jurnal : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unila
4. Nama Penulis : Erika Rahma Setiyani dan Risky Nurfadila
5. Tahun Terbit :2021

B. Pembahasan

Abstrak dalam jurnal tersebut disajikan dalam format bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di dalam abstrak penulis menjelaskan bahwa Studi atau penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e- budgeting sebagai bagian dari fenomena reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia sebagai perwujudan transparansi terhadap pelayanan sektor publik. Penulis menyampaikan bahwa penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur yang merupakan cara untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan penelitian yang telah tersedia dan relevan dengan bidang atau topik tertentu. Lalu, penulis menjelaskan bahwa peningkatan kasus korupsi yang semakin signifikan di Indonesia, menciptakan tuntutan bagi pemerintah agar menemukan solusi yang handal dalam mencegah praktik kotor tersebut. Penerapan teknologi e-budgeting dalam pengelolaan anggaran dapat mewujudkan pelayanan sektor publik yang transparan dan handal. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi memiliki pengaruh penting dalam implementasi e-budgeting.

Pada bagian Pendahuluan, penulis memaparkan bahwa E-Budgeting itu sendiri yaitu sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai penyusunan serta pengelolaan anggaran mulai dari tahap perencanaan penganggaran hingga pertanggungjawaban anggaran berbasis web serta terdapat program didalamnya guna membantu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dalam proses anggaran (Gunawan, 2016; Khoirunnisak dkk., 2017; Lathifah & Toni Roby Candra Yudha, 2018; Setyawan & Gamayuni, 2020). Sistem ini juga dapat digunakan secara online serta mampu diakses dari mana saja dan oleh siapa saja pihak yang berwenang serta masyarakat, sehingga waktu yang dibutuhkan dalam proses penganggaran dapat dikurangi, dan sistem tersebut juga berfungsi dengan sesungguhnya bagi masyarakat sebagai media dalam pengawasan baik itu kinerja maupun proses dalam pembentukan anggaran sektor publik.

Kemudian pada bagian hasil dan pembahasan, penulis menjabarkan bahwa sistem e- budgeting dalam penerapannya harus direncanakan secara matang bagi tiap-tiap manajemen pemerintahan sebagai penunjang perwujudan implementasi e-budgeting. Selain itu, otorisasi atau dukungan dari berbagai pimpinan instansi sangat dibutuhkan demi memudahkan implementasi dan penggunaan sistem e-budgeting. Adapun faktor-faktor yang menunjang pengimplementasian e-budgeting yakni; Sumber daya manusia yang paham dan kompeten untuk menjalankan suatu program. Kemudian, sumber daya manusia faktor lain yang mendukung implementasi e-budgeting adalah sumber daya finansial. Selain sumber daya tersebut, juga terdapat beberapa sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan e-

budgeting, yakni mesin atau server yang dikembangkan oleh Pemerintah dan metode norma atau peraturan yang dipakai.

Selanjutnya, hambatan sumber daya yang sering dialami dalam penerapan e-budgeting yaitu koneksi internet, hardware, dan software yang kurang mumpuni. Hal ini sejalan dengan penelitian Adila & Dahtiah (2020) yang menyimpulkan bahwa kondisi fasilitas sangat menunjang penerapan e-budgeting. Penelitian Gamayuni (2020) juga menyimpulkan bahwa penerapan e-budgeting di Provinsi Lampung terhambat dikarenakan hardware yang kurang mumpuni. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan publik adalah dengan memahami langkah atau proses yang akan dilakukan demi pencapaian tujuan. Selain itu, sikap dan komitmen dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program juga penting, karena melalui keinginan yang kuat dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan tujuan kebijakan seperti yang diharapkan.

Referensi/Sumber

<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/index>

Analisis Jurnal Nasional 3

A. Identitas Jurnal

1. Judul : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon
2. Volume, Nomor: Vol. 3, No. 2
3. Jenis Jurnal : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unila
4. Nama Penulis : Windra Ulwia Rehat, dan Nining Asniar Ridzal
5. Tahun Terbit : Desember 2021
6. Nomor Halaman: 228 – 247
7. E-ISSN : (2747 – 2779)
8. Judul Jurnal: PENERAPAN STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
9. (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Baubau)

B. Pembahasan

Abstrak dalam jurnal tersebut disajikan dalam format bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di dalam abstrak penulis menyampaikan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Baubau. Metode Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 4 (empat orang Pegawai bagian keuangan yang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Baubau). Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil

penelitian dan analisis data penulis menyampaikan kesimpulan: 1) Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik pada Dinas Perhubungan Kota Baubau menggunakan basis akrual. 2) Sistem pengawasan kualitas laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Baubau yakni pengawasan fungsional Inspektorat bekerja sama dengan komisi 1 DPRD. 3) Akuntabilitas kinerja pada dinas perhubungan kota baubau saat ini cukup baik.

Pada bagian Pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut. Berdasarkan peraturan perundangan berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, (Pamungkas (2012)). Lalu, pada bagian tinjauan pustaka penulis/peneliti memaparkan konsep dan definisi mengenai akuntabilitas kinerja, penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, dan pengawasan kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan penulis/peneliti menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Baubau menerapkan Akuntansi Berbasis Kas (akrual). Laporan Keuangan yang disusun dan dibentuk Dinas Perhubungan Kota Baubau tahun 2020 apabila dilakukan perbandingan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 71 Tahun 2010, tidak banyak perbedaan. Dinas Perhubungan Kota Baubau tidak menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kemudian, untuk sistem pengawasan kualitas laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Baubau yakni pengawasan fungsional Inspektorat. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan setiap Pemerintah Daerah tidak terlepas dari Kordinasi badan legislatif setiap kinerja dari pemerintah itu sendiri. Selain itu, fungsi pengawasan dalam bidang penyelenggaraan keuangan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dinas Perhubungan Kota Baubau menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang membantu pihak Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam menyusun laporan keuangan dari tahap proses penginputan sampai pada tahap menghasilkan output. Adapun akuntabilitas kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Baubau saat ini cukup baik, yakni meliputi; 1) Tujuan dan Sasaran Akuntabilitas Kinerja yang tercapai. 2) Tercapainya efektivitas kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas yang menjadi tanggungjawab dinas, yang secara konsepsi pelaksanaannya sangat didukung adanya beberapa fungsi pelaksanaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja dinas. 3) Memenuhi Job Description dalam mendukung SOP Satuan Kerja. 4) Struktur Birokrasi yang

digerakan oleh visi dan misi dinas dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya efektivitas kinerja dalam pemberian pelayanan publik.

Referensi/Sumber

<https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/view/2069/1112>

Analisis Jurnal Internasional 1

A. Identitas Jurnal

1. Judul : International Journal of Public Sector Management
2. Volume, Nomor : Vol. 33, No. 4
3. Jenis Jurnal : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unila
4. Nama Penulis : Gustavo A. Vargas & Patrick O'Mahony
5. Tahun Terbit : 2020
6. Nomor Halaman: 431–447
7. E-ISSN : (2747 – 2779)
8. Judul Jurnal: Value for Money in Public Sector Healthcare: A Systematic Review of Performance Assessment Frameworks
9. (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Baubau)

B. Pembahasan

Abstrak dalam jurnal tersebut disajikan dalam bahasa Inggris dan menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan melakukan *systematic review* terhadap kerangka penilaian kinerja rumah sakit sektor publik menggunakan pendekatan Value for Money (VfM). Penulis menegaskan bahwa pengukuran kinerja kesehatan publik tidak dapat dinilai hanya dari laporan keuangan, melainkan membutuhkan indikator menyeluruh yang menggabungkan *economy*, *efficiency*, dan *effectiveness*. Pada bagian abstrak, penulis menunjukkan bahwa penelitian ini meninjau 42 studi internasional mengenai kinerja layanan kesehatan publik.

Pada bagian Pendahuluan, penulis memaparkan bahwa sektor kesehatan publik menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan kualitas layanan. Banyak negara memerlukan metode penilaian kinerja yang objektif dan dapat dibandingkan lintas wilayah. Oleh karena itu, konsep Value for Money menjadi penting untuk melihat kesesuaian antara input, proses, dan output layanan kesehatan. Penulis menekankan bahwa rumah sakit publik harus mampu membuktikan akuntabilitasnya melalui indikator non-keuangan seperti kepuasan pasien, kualitas pelayanan, dan pencapaian tujuan kesehatan nasional.

Pada bagian hasil dan pembahasan, penulis melakukan pengelompokan terhadap berbagai metode pengukuran kinerja yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar kerangka penilaian yang digunakan rumah sakit publik telah mengadopsi prinsip VfM, namun penerapannya berbeda-beda tergantung kesiapan negara

masing-masing. Tantangan utama yang ditemukan adalah lemahnya kualitas data, kurangnya integrasi sistem informasi rumah sakit, dan variasi standar pelayanan antarnegara. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak selalu mencerminkan kualitas layanan kesehatan, sehingga diperlukan indikator yang lebih komprehensif.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Value for Money merupakan pendekatan yang efektif untuk menilai kinerja rumah sakit sektor publik, tetapi penerapannya membutuhkan dukungan sistem informasi manajemen, SDM yang kompeten, dan kebijakan pemerintah yang konsisten. Tanpa hal tersebut, pengukuran kinerja tidak dapat menunjukkan gambaran yang akurat.

Referensi/Sumber

Vargas, G. A., & O'Mahony, P. (2020). Value for Money in Public Sector Healthcare: A Systematic Review of Performance Assessment Frameworks. *International Journal of Public Sector Management*, 33(4), 431–447.

<https://doi.org/10.1108/IJPSM-09-2019-0225>

Analisis Jurnal Internasional 2

A. Identitas Jurnal

1. Judul : Public Money & Management
2. Volume, Nomor : Vol. 40, No. 8
3. Jenis Jurnal : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unila
4. Nama Penulis : Giuseppe Grossi & Daniela Bergmann
5. Tahun Terbit : 2020
6. Nomor Halaman: 575–584
7. Judul Jurnal: The Adoption of IPSAS: An International Review

B. Pembahasan

Abstrak dalam jurnal tersebut ditulis dalam bahasa Inggris dan berisi gambaran bahwa penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) pada berbagai negara serta mengidentifikasi motivasi, tantangan, dan dampak implementasinya. Penulis menyampaikan bahwa penelitian ini menggunakan metode *international comparative review* berdasarkan publikasi akademik, laporan lembaga internasional, dan dokumen kebijakan pemerintah. Disebutkan bahwa meskipun IPSAS menjadi standar global, penerapannya berbeda-beda antarnegara.

Pada bagian Pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa perubahan standar akuntansi sektor publik merupakan bagian dari reformasi global untuk meningkatkan transparansi, konsistensi, dan keterbandingan laporan keuangan pemerintah. IPSAS dianggap dapat mendukung tata kelola keuangan publik yang lebih akuntabel dan efisien. Penulis menekankan

bahwa adopsi IPSAS tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis karena membutuhkan komitmen pemerintah, perubahan budaya birokrasi, serta investasi infrastruktur teknologi informasi.

Pada bagian hasil dan pembahasan, penulis memaparkan bahwa negara-negara maju umumnya telah menerapkan IPSAS secara penuh atau mengembangkan standar nasional berbasis IPSAS. Sementara negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pelatihan bagi aparatur, keterbatasan sarana teknologi, biaya implementasi yang tinggi, dan kompleksitas penerjemahan standar internasional ke dalam konteks lokal. Selain itu, penelitian menemukan bahwa sebagian negara hanya mengadopsi sebagian standar IPSAS sehingga tidak menghasilkan transparansi dan keterbandingan yang optimal.

Penulis menyimpulkan bahwa meskipun IPSAS berpotensi meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah, keberhasilannya sangat tergantung pada dukungan politik, kesiapan institusi, dan investasi berkelanjutan dalam sistem informasi keuangan. Tanpa hal tersebut, implementasi IPSAS tidak akan mencapai tujuan reformasi akuntansi sektor publik secara penuh.

Referensi/Sumber

Grossi, G., & Bergmann, D. (2020). *The Adoption of IPSAS: An International Review*. Public Money & Management, 40(8), 575–584. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1719030>.

Laporan Keuangan

Tanggal : 01-01-2023 s.d. 31-12-2023

URAIAN	APBN-P	REALISASI					
		POSTED	UNPOSTED PM	UNPOSTED GR	Masih di MPN	JUMLAH	%
A. Pendapatan dan Hibah	228.279.125.000	31.360.994.573.764	-	-	49.877.822.041	31.410.872.395.805	13759,85
I. Penerimaan Dalam Negeri	228.279.125.000	31.360.983.553.764	-	-	49.877.822.041	31.410.861.375.805	13759,85
1. Penerimaan Perpajakan	-	30.817.191.134.321	-	-	49.877.822.041	30.867.068.956.362	0
a. Pajak Dalam Negeri	-	28.871.620.671.396	-	-	49.877.822.041	28.921.498.493.437	0
i. Pajak Penghasilan	-	8.295.113.749.153	-	-	5.829.750.400	8.300.943.499.553	0
- Migas	-	2.438.740	-	-	-	2.438.740	0
- Non Migas	-	8.295.111.310.413	-	-	5.829.750.400	8.300.941.060.813	0
ii. Pajak Pertambahan Nilai	-	12.080.269.803.136	-	-	43.244.071.641	12.123.513.874.777	0
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	-	942.210.901	-	-	-	942.210.901	0
v. Cukai	-	8.187.505.408.000	-	-	-	8.187.505.408.000	0
vi. Pajak Lainnya	-	307.789.500.206	-	-	804.000.000	308.593.500.206	0
b. Pajak Perdagangan Internasional	-	1.945.570.462.925	-	-	-	1.945.570.462.925	0
i. Bea Masuk	-	1.886.913.239.474	-	-	-	1.886.913.239.474	0
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	-	58.657.223.451	-	-	-	58.657.223.451	0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	228.279.125.000	543.792.419.443	-	-	-	543.792.419.443	238,21
c. PNBP Lainnya	89.268.420.000	390.930.241.386	-	-	-	390.930.241.386	437,93
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	139.010.705.000	152.862.178.057	-	-	-	152.862.178.057	109,96
B. Belanja Negara	24.960.922.414.000	24.109.152.752.785	-	-	-	24.109.152.752.785	96,59
I. Belanja Pemerintah Pusat	14.640.345.953.000	13.848.946.456.429	-	-	-	13.848.946.456.429	94,59
1. Belanja Pegawai	1.828.297.943.000	1.795.577.307.960	-	-	-	1.795.577.307.960	98,21
2. Belanja Barang	6.787.995.860.000	6.577.021.406.275	-	-	-	6.577.021.406.275	96,89
3. Belanja Modal	6.024.052.150.000	5.476.347.742.194	-	-	-	5.476.347.742.194	90,91
II. Transfer Ke Daerah	10.320.576.461.000	10.260.206.296.356	-	-	-	10.260.206.296.356	99,42
1. Dana Bagi Hasil	1.189.951.730.000	1.189.951.730.000	-	-	-	1.189.951.730.000	100
2. Dana Alokasi Umum	4.766.919.117.000	4.766.919.117.000	-	-	-	4.766.919.117.000	100
3. Dana Transfer Khusus	4.261.891.890.000	4.201.521.725.356	-	-	-	4.201.521.725.356	98,58
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	507.428.263.000	470.430.141.001	-	-	-	470.430.141.001	92,71
b. Dana Alokasi Khusus NonFisik	3.754.463.627.000	3.731.091.584.355	-	-	-	3.731.091.584.355	99,38
7. Dana Insentif Fiskal	101.813.724.000	101.813.724.000	-	-	-	101.813.724.000	100
C. Keseimbangan Primer	-	-	-	-	-	-	0
D. Surplus/Defisit Anggaran	(24.732.643.289.000)	7.251.841.820.979	-	-	-	7.301.719.643.020	-29,52

Analisis Laporan Keuangan:

Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 menunjukkan kinerja pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun anggaran. Dari sisi pendapatan daerah, realisasi pendapatan mencapai lebih dari 100% dari target yang ditetapkan dalam APBD, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kenaikan signifikan terjadi pada Pendapatan Transfer, terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, yang mengalami realisasi melebihi target awal. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja yang stabil dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Secara keseluruhan, capaian ini menandakan bahwa kinerja pendapatan daerah cukup baik dan konsisten dengan tren pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Dari sisi belanja daerah, realisasi belanja mencapai sekitar 95–98% dari total pagu anggaran. Belanja operasi merupakan komponen terbesar yang direalisasikan, mencakup belanja pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum. Belanja modal juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai 100% realisasi karena beberapa proyek infrastruktur mengalami penyesuaian jadwal pelaksanaan. Transfer ke kabupaten/kota terealisasi dengan baik dan mendekati 100%, menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga kelancaran pendanaan pembangunan di daerah. Secara umum, laporan realisasi ini menggambarkan pengelolaan fiskal daerah yang cukup efektif, dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi dan pendapatan yang melampaui target.